menolak sponsor-sponsor yang dianggap merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa klub adalah identitas komunal, sebuah kearifan lokal yang tidak boleh dijual kepada penawar tertinggi.

Bagi para pengikut "Politik Tribun" ini, skor akhir di papan elektronik hanyalah angka. Kemenangan sejati adalah ketika mereka masih bisa berdiri tegak di tribun, bernyanyi bersama kawan sekelas, tanpa harus merasa asing di rumah sendiri.

Penutup: Nafas yang Terus Ada

Di antara bau keringat, asap belerang, dan nyanyian yang parau, politik kiri di tribun stadion terus bernafas. Ia mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang: solidaritas.

Selama masih ada kelas yang tertindas, selama masih ada ketidakadilan di luar gerbang stadion, maka tribun akan selalu menjadi ruang sosial yang hidup. Ia akan tetap menjadi tempat di mana buruh, mahasiswa, dan rakyat jelata bisa berteriak sekencang-kencangnya, menyatakan bahwa lapangan hijau bukan milik korporasi, melainkan milik mereka yang mencintainya dengan tulus.

Karena pada akhirnya, seperti yang pernah dikatakan oleh banyak aktivis di kurva stadion: *Football without fans is nothing*. Dan fans tanpa kesadaran politik, hanyalah pion di tangan para penguasa.

DI ANTARA RIUH STADION DAN SENYAPNYA JALANAN, ADA BARISAN KATA YANG HARUS SAMPAI KE TUJUAN. KAMI TIDAK SEDANG MEMINTA BELAS KASIHAN, KAMI SEDANG MENGAJAK KALIAN MENDANAI SERANGAN BALIK TERHADAP KEMANDEKAN LITERASI. SETIAP KEPING DI KENCLENG SUKARELA ADALAH NAPAS BAGI DISTRIBUSI KAMI UNTUK MELIPATGANDAKAN SERANGAN.

BAGI PEMILIK USAHA DI BAWAH PAYUNG SUBKULTUR YANG SAMA: BERGABUNGLAH DALAM SINERGI INI, ATAU BIARKAN API LITERASI SUPORTER PADAM DALAM DIAM. SUARAKAN NIATMU DI DM INSTAGRAM KAMI.

WORDS OF DEFIANCE

instagram :
wordsofdefiance_
e-mail :
wordsofdefiancefanzine@gmail.com

EDISI #3 DIDUKUNG OLEH :

#3 EDITION WORDS OF DEFIANCE for the fans, by the fans.
gratis! silahkan di copy ulang!

BANTER PROFESI YANG TIDAK RELEVAN DALAM SEPAK BOLA INDONESIA

DITULIS OLEH : MIRFANALGHIFARI

Akhir-akhir ini, jagat sepak bola Indonesia diramaikan oleh berbagai isu negatif, mulai dari rasisme, ancaman, hingga penghinaan berlebihan kepada para pemain profesional. Memang benar bahwa membandingkan satu kesalahan dengan kesalahan lainnya tidak akan menghasilkan kebenaran. Namun, jauh sebelum isu-isu tersebut mencuat, ada fenomena yang seharusnya tidak pernah terjadi karena konteksnya sangat melenceng dari istilah "banter" atau "psywar" dalam sepak bola: yakni penghinaan terhadap profesi atau pekerjaan.

Penghinaan berbasis profesi ini sudah lama membayangi persaingan sepak bola, khususnya yang melibatkan basis suporter asal Bandung. Sayangnya, ejekan semacam ini justru datang dari berbagai elemen suporter di Indonesia. Legenda sepak bola, Eric Cantona, pernah berujar: "*The real fans of football come from the working class. Now they cannot afford to come and watch the game*." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa akar rumput sepak bola adalah kelas pekerja. Namun ironisnya, di Indonesia, identitas kelas pekerja ini justru dijadikan bahan cemoohan yang seolah abadi. Sebutan seperti "kang cilok," "kang burjo," hingga "kang cuanki" terus diulang-ulang di luar konteks persaingan lapangan hijau.

Yang terbaru dan cukup menyita perhatian adalah munculnya sebuah spanduk bertuliskan: "*Gue ke Bandung buat liburan, Sia ke Jakarta buat cari uang*." Bagi mereka yang memahami hakikat sepak bola, kalimat tersebut terasa sangat menohok sekaligus paradoks. Sepak bola sejatinya lahir dari rahim kelas pekerja (*working class*). Mereka bekerja keras dari Senin hingga Jumat, lalu menjadikan pertandingan di akhir pekan sebagai bentuk hiburan untuk melepas penat. Menghina seseorang karena mereka mencari nafkah di kota lain bukan hanya tidak relevan dengan sepak bola, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah olahraga ini.

Banyak yang berpendapat bahwa laki-laki jarang menghina profesi orang lain karena mereka memahami betul beban dan tuntutan untuk bekerja keras demi bertahan hidup. Oleh karena itu, sangatlah aneh jika penghinaan profesi masih lestari dalam lingkungan suporter kita. Hal ini seolah mengamini pandangan salah satu seniman asal Bali mengenai fenomena "Jakarta-sentris." Narasi tersebut seolah merendahkan mereka yang harus bermigrasi demi penghidupan yang lebih baik.

Padahal, secara sosiologis, setiap orang bebas bekerja di mana saja—di kota mana pun, daerah mana pun, hingga pelosok kecamatan mana pun. Sejak sekolah dasar, kita telah diajarkan mengenai konsep urbanisasi sebagai fenomena yang lumrah. Perpindahan penduduk demi mendapatkan upah yang layak dengan cara yang halal adalah hak setiap warga negara. Selama pekerjaan tersebut tidak melanggar hukum, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mencaci atau menghinanya.

Menjadikan mata pencaharian seseorang sebagai bahan lelucon dalam sepak bola adalah tindakan yang sama sekali tidak relevan. Semoga ke depannya kita bisa lebih dewasa dan memahami batasan dalam bersuara. Masih banyak bahan *banter* atau *psywar* kreatif yang tetap berada dalam koridor rivalitas olahraga tanpa harus menyentuh ranah harga diri pekerjaan seseorang.

Akar yang Tertanam di Pabrik

Sejarah sepakbola adalah sejarah kelas pekerja. Jauh sebelum hak siar televisi bernilai miliaran Euro, klub-klub besar Eropa lahir dari keringat buruh pabrik, pekerja galangan kapal, dan komunitas tambang. Di Liverpool, di Dortmund, hingga di pinggiran Turin, sepakbola adalah satu-satunya kemewahan yang bisa dinikmati kaum proletar setelah sepekan memeras keringat di bawah perintah mandor.

Sentimen ini tidak pernah benar-benar mati. Ia berevolusi menjadi subkultur yang kuat. Lihat saja FC St. Pauli di Hamburg, Jerman. Di distrik pelabuhan itu, logo tengkorak dan tulang bersilang bukan simbol bajak laut pemangsa, melainkan simbol perlawanan terhadap fasisme, rasisme, dan seksisme. Bagi mereka, mendukung klub adalah aktivitas politik. Mereka tidak hanya bernyanyi tentang kemenangan, tapi juga tentang hak-hak pengungsi dan ruang hidup yang inklusif.

"Sepakbola adalah milik rakyat," demikian kredo yang sering terdengar. Namun, di era sepakbola modern, "rakyat" mulai disingkirkan oleh kursi-kursi VIP dan harga tiket yang melambung tinggi demi memenuhi neraca keuangan pemilik modal dari Timur Tengah atau konsorsium Amerika Serikat.

Spanduk Sebagai Senjata

Di tribun, kata-kata adalah amunisi. Ketika suporter Livorno di Italia membentangkan poster raksasa bergambar Che Guevara, mereka sedang mengirim pesan kepada dunia: kami tidak akan tunduk pada hegemoni sayap kanan. Ketika suporter Celtic di Skotlandia mengibarkan bendera Palestina, mereka sedang menarik garis solidaritas internasional yang melampaui batas-batas geografi dan agama.

Di Indonesia, kesadaran ini mulai tumbuh perlahan namun pasti. Stadion-stadion kita, yang selama puluhan tahun terjebak dalam fanatisme buta berbasis kedaerahan, mulai disusupi oleh gerakan-gerakan kolektif. Komunitas suporter mulai terlibat dalam isu-isu sosial: dari advokasi konflik agraria, penolakan penggusuran, hingga solidaritas untuk korban ketidakadilan.

Tragedi Kanjuruhan menjadi titik balik yang pahit sekaligus mencerahkan. Di sana, suporter menyadari bahwa musuh mereka bukanlah suporter tim lawan, melainkan sistem yang abai terhadap keselamatan manusia demi kelancaran bisnis dan kekuasaan. Slogan *"Solidarity Over Profit"* yang tadinya hanya keren di poster, kini menjadi jeritan yang nyata di tenggorokan mereka.

Melawan Arus Komersialisasi

Sepakbola hari ini adalah sebuah mesin uang yang efisien. Namun, efisiensi itu seringkali memakan "roh" dari permainan itu sendiri. Identitas lokal klub seringkali dikorbankan demi *branding* global. Logo klub diganti agar lebih "minimalis", stadion bersejarah dijual namanya kepada maskapai penerbangan, dan jam tayang diatur demi penonton di benua lain, mengabaikan mereka yang telah setia datang ke tribun selama bergenerasi-generasi.

Subkultur kiri di dalam stadion mencoba membendung arus ini. Mereka mengorganisir diri dalam bentuk kolektif yang egaliter. Mereka

IDEOLOGI DI BALIK SEPASANG TIANG GAWANG: DARAH MERAH DI TRIBUN STADION

DITULIS OLEH: ANWAR SELAMET

DI bawah temaram lampu stadion yang berkabut asap *flare*, sepakbola berhenti menjadi sekadar olahraga. Di sana, di tribun utara atau selatan yang bising, sepakbola bermutasi menjadi sebuah manifesto. Ia bukan lagi tentang sebelas orang mengejar bola di atas rumput hijau selama sembilan puluh menit, melainkan tentang ribuan orang yang mencoba merebut kembali martabat mereka dari cengkeraman industrialisme yang kian rakus.

Bagi sebagian orang, stadion adalah rumah ibadah akhir pekan. Namun bagi kelompok suporter yang memegang teguh garis politik kiri, tribun adalah barikade terakhir. Di sana, slogan "Against Modern Football" bukan sekadar tempelan di jaket *parka*, melainkan perlawanan terhadap komodifikasi yang mengubah suporter dari "pemilik jiwa klub" menjadi sekadar "konsumen tiket".

KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH POLISI DI MALUKU: MENELAAH TRAGEDI MENUJU PERBAIKAN

DITULIS OLEH: ADIYA RAFA

Tragedi yang menimpa seorang anak di bawah umur yang dibunuh oleh anggota polisi di Maluku baru-baru ini menjadi sorotan publik yang menyayat hati. Peristiwa ini mengundang pertanyaan serius mengenai praktik penegakan hukum di Indonesia. Peristiwa tersebut bermula saat dua korban yang merupakan kakak beradik melintas menggunakan sepeda motor di ruas jalan RSUD Maren, Maluku. Saat itu, keduanya masih mengenakan seragam sekolah karena tercatat sebagai siswa kelas IX di salah satu sekolah Islam negeri setingkat SMP.

Di lokasi kejadian, keduanya diduga dihentikan oleh pelaku. Tak lama kemudian, oknum tersebut diduga memukul korban menggunakan helm hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti mengapa anggota polisi tersebut langsung melakukan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, satu korban berinisial AT (14) meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Kamis (19/2/2026), sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit. Terduga pelaku, Bripda MS, telah diamankan tak lama setelah kejadian dan kini ditahan di rumah tahanan Polres Kota Tual.

Peristiwa ini bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari rentetan kejadian menyakitkan yang terjadi sebelumnya. Mulai dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan

ratusan nyawa, hingga kasus individu seperti Affan Kurniawan (pengemudi ojek online) yang terlindas mobil rantis polisi saat berpartisipasi dalam demonstrasi, serta Randi dan Yusuf, mahasiswa Universitas Halu Oleo yang tewas saat unjuk rasa penolakan RKUHP tahun 2019. Meskipun kontribusi dan peran penting Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat tidak bisa diabaikan, rentetan kasus ini menunjukkan bahwa langkah-langkah perbaikan mendasar sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Rentetan Kasus yang Mengingatkan pada Kebutuhan Reformasi

Data dan catatan kejadian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan korban jiwa dalam konteks penanganan demonstrasi atau proses penegakan hukum telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan tahun 2022, misalnya, di mana bentrokan antara polisi dan pendukung klub sepak bola menyebabkan kurang lebih 135 orang tewas, menjadi bukti nyata tentang risiko yang muncul ketika penanganan situasi massa tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip hukum yang berlaku. Begitu pula dengan kasus Affan Kurniawan pada tahun 2025 serta gugurnya Randi dan Yusuf pada 2019; semuanya menunjukkan pola yang memerlukan perhatian serius. Terlihat adanya celah di mana proses menjaga ketertiban terkadang tidak sejalan dengan upaya melindungi keselamatan warga negara, bahkan terhadap mereka yang tengah menyampaikan aspirasi.

Kasus terbaru di Maluku, di mana korbannya adalah anak di bawah umur, semakin memperparah kekhawatiran publik. Anak-anak adalah kelompok rentan yang memiliki hak khusus untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Fakta bahwa peristiwa ini bisa terjadi menunjukkan adanya celah dalam sistem pelatihan, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban di internal institusi kepolisian. Meskipun tidak semua anggota polisi terlibat dalam tindakan menyimpang, kejadian ini menjadi cermin akan kebutuhan untuk memperkuat standar profesionalisme, kesadaran hak asasi manusia (HAM), dan kemampuan penanganan situasi yang sesuai dengan kondisi lapangan di seluruh tingkatan institusi.

Perlu diakui bahwa tugas polisi di Indonesia sangatlah kompleks. Mereka harus menangani berbagai situasi, mulai dari menjaga keamanan sehari-hari hingga menanggapi aksi demonstrasi massa besar dengan dinamika yang sulit diprediksi. Banyak anggota polisi yang menjalankan tugas dengan baik, berkorban demi keamanan masyarakat, dan menunjukkan integritas tinggi. Namun, keberadaan kasus-kasus kekerasan ini tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan perbaikan. Hal tersebut tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang merupakan fondasi negara hukum yang adil dan demokratis.

Langkah-Langkah Menuju Polisi yang Profesional dan Bertanggung Jawab

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):

1. Penguatan Pelatihan HAM dan Perlindungan Anak: Polri perlu memperkuat pelatihan mengenai penanganan massa, hak asasi manusia, dan perlindungan anak bagi seluruh anggota. Pelatihan penanganan demonstrasi harus fokus pada teknik non-kekerasan dan komunikasi efektif. Khusus untuk perlindungan anak, pelatihan harus menekankan standar prosedur khusus yang wajib diterapkan ketika anak terlibat dalam situasi apa pun, baik sebagai peserta aksi maupun dalam kasus pidana.
2. Mekanisme Pengawasan yang Transparan: Setiap kasus yang melibatkan korban jiwa atau cedera berat harus diselidiki secara objektif oleh tim independen dengan melibatkan Komnas HAM atau lembaga terkait. Proses penyidikan dan pengadilan harus berjalan cepat, adil, dan terbuka bagi publik guna menghindari kesan adanya perlindungan terhadap oknum yang bersalah. Selain itu, sistem pelaporan internal (*whistleblowing system*) yang aman perlu diperkuat bagi anggota yang ingin mengungkap praktik menyimpang.
3. Perbaikan Prosedur Operasional Lapangan (SOP): Prosedur operasional (SOP), khususnya untuk penanganan massa dan anak-anak, harus dirumuskan lebih rinci sesuai standar internasional HAM. Perlu ada aturan yang sangat jelas mengenai penggunaan alat taktis seperti mobil rantis, termasuk aturan kecepatan dan jarak aman. Penggunaan kekerasan harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara proporsional.
4. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil: Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan dalam bentuk pemantauan bersama terhadap penanganan aksi massa serta edukasi masyarakat tentang cara menyampaikan aspirasi secara damai.
5. Restorasi Kepercayaan Publik: Polri harus membangun kembali kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Dalam kasus sensitif seperti di Maluku, pemberian informasi yang akurat secara tepat waktu sangat krusial untuk menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan institusi kepolisian dapat bertransformasi menjadi pelindung masyarakat yang sesungguhnya, di mana ketertiban umum terjaga tanpa harus mengorbankan nyawa dan hak asasi manusia.

Sumber:
https://nasional.kompas.com/read/2026/02/21/13072521/kasus-anggota-brimob-aniaya-pelajar-di-maluku-polri-akui-telah-cederai.